

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah Indonesia pada tahun 1994 (Amuda, 2005) mewajibkan setiap anak berusia enam sampai lima belas tahun wajib mengenyam Pendidikan Dasar melalui Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (M.Ts). atau program penyetaraan Paket A (persamaan SD) dan paket B (persamaan SLTP). Hal ini berarti bahwa setiap anak Indonesia wajib menyelesaikan pendidikannya minimal hingga jenjang SLTP, tidak terkecuali berlaku pula bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) atau yang lebih dikenal sebagai anak luar biasa.

Kewajiban menyelesaikan pendidikan dasar hingga tingkat SLTP tersebut, dalam pelaksanaannya telah ditindaklanjuti dengan adanya berbagai sistem dukungan baik dari pemerintah maupun swasta, melalui berbagai program layanan pendidikan pada sekolah umum maupun sekolah khusus. Program-program tersebut antara lain pendidikan dasar gratis, bantuan operasional sekolah (BOS), beasiswa, peningkatan mutu layanan, dan lain sebagainya. Berbagai program tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mensukseskan upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945.

Berbagai upaya memberikan layanan pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun dirasakan makin meningkat. Perjalanan peningkatan layanan pendidikan

khususnya layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) terlihat dari penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABK di Jawa Barat yang telah dikembangkan melalui beberapa pendekatan pendidikan kebutuhan khusus. Dimulai dari pelayanan yang bersifat segregasi, kemudian integrasi, maka saat ini layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus semakin berkembang dengan munculnya pendidikan inklusif.

Berkembangnya paradigma pendidikan inklusif sejalan dengan adanya kesadaran akan keharusan memberikan layanan pendidikan untuk semua (PUS), seperti yang dinyatakan dalam pernyataan resmi UNESCO dalam Garnida (2008) tentang pendidikan untuk semua (*Education For All* atau *EFA*) pada tahun 1990. Dalam pernyataan tersebut diisyaratkan bahwa:

Setiap orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini berarti setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhannya tanpa diskriminasi status sosial, gender, kondisi fisik dan lain sebagainya.

Layanan pendidikan inklusif secara lebih spesifik membutuhkan kemampuan setiap tenaga pendidik dan kependidikan untuk dapat menghargai dan melayani kelas dengan siswa beragam. Tenaga pendidik dan kependidikan yang terjun ke dalamnya selayaknya memiliki ketrampilan mendidik siswa dengan seluruh keberagaman yang ada.

Kewajiban memberikan layanan pendidikan terhadap seluruh siswa tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ada di sekolah-sekolah reguler yang berstatus sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) pada prakteknya menimbulkan permasalahan serius bagi SPPI. Dari hasil pra penelitian yang dilakukan penulis di Kota Bandung tahun 2011 ditemukan bahwa 100%

SPPI yang diteliti mengalami kesulitan dalam memberikan layanan pendidikan inklusif bagi ABK. Kesulitan utama SPPI adalah SDM yang belum kompeten dalam menangani ABK, sehingga SPPI membutuhkan dukungan agar dapat melayani kebutuhan ABK terutama dalam layanan pembelajarannya. Hal ini sesuai penelitian Dadang Garnida (2009), yang menemukan bahwa “Dukungan yang paling diharapkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah dukungan yang berupa pendampingan dalam proses pembelajaran di mana di dalamnya terdapat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)”. Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di SPPI khususnya dalam praktek melayani ABK sangat membutuhkan adanya sistem dukungan.

Di Jawa Barat khususnya Kota Bandung, sistem dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif telah memiliki beberapa wadah resmi yang diharapkan mampu mengupayakan keberhasilan pendidikan inklusif. Akan tetapi pada kenyataannya hasil survey yang dilakukan Garnida (2009), menemukan bahwa “...sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung secara efektif dan efisien”.

Salah satu bentuk sistem dukungan yang termasuk belum mampu memberikan dukungan secara optimal terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif sebagaimana hasil penelitian di atas adalah *Resource Center* (Pusat Sumber). Belum optimalnya dukungan *Resource Center* terhadap pendidikan inklusif khususnya dalam membantu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) mengindikasikan bahwa *Resource Center* mengalami kesulitan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang

dilakukan penulis pada awal penelitian yang menemukan bahwa dua dari tiga kepala *Resource Center* merasa kesulitan menjalankan peran dan fungsi lembaganya.

Salah satu bagian dari layanan *Resource Center* dalam mendukung SPPI melaksanakan pendidikan inklusif adalah dengan mengirimkan tenaga guru pembimbing khusus (GPK) ke sekolah-sekolah tersebut. Keberadaan GPK pada *Resource Center* sebagai sebuah fenomena terjadi seiring dengan perkembangan dukungan terhadap pendidikan inklusif. Kehadirannya melekat bersama munculnya *Resource Center* di Jawa Barat yang telah lahir sejak tahun 2005 (Amuda, 2009). Akan tetapi pada kenyataannya keberadaan GPK sebagai ujung tombak *Resource Center* dalam memberikan layanan bagi SPPI ternyata belum mampu memberikan kontribusi sesuai yang diharapkan bagi suksesnya pendidikan inklusif. Hasil penelitian Dyah S. (2008), menemukan bahwa:

...masih minimnya fungsi dari keberadaan GPK menjadikan pelaksanaan inklusif masih kurang baik dilihat dari sisi teori. Dari 11 sekolah dasar inklusif di Indonesia yang dijadikan sampel, GPK hanya ada di 8 sekolah dan hanya 3 diantaranya yang aktif. Hal ini menunjukkan masih minimnya keberadaan GPK yang mumpuni untuk sekolah dasar inklusif di Indonesia.

Masih minimnya fungsi GPK memperlihatkan bahwa GPK mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dibuktikan dari hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti di Kota Bandung bahwa seluruh GPK yang disurvei mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Kesulitan GPK dalam menjalankan tugasnya diperkirakan salah satunya karena faktor kompetensi GPK. Dari lima GPK dan lima kepala SPPI yang di survey hanya satu yang menyatakan

bahwa GPK dari *Resource Center* memadai dari segi kompetensi, sisanya menganggap masih perlu dikembangkan, atau tidak tahu.

Pendapat kepala SPPI dan GPK yang menyatakan bahwa kompetensi GPK masih perlu dikembangkan menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena SPPI sebagai pihak yang membutuhkan bantuan selayaknya mendapatkan layanan yang seoptimal mungkin dari GPK yang kompeten di bidangnya. Di sisi lain pendapat SPPI terhadap kompetensi GPK merupakan representasi dari tingkat kepuasan SPPI terhadap kinerja GPK serta merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja GPK dalam membantu SPPI selama ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang perlu untuk melihat kompetensi GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya mendukung SPPI melaksanakan pendidikan inklusif menurut perspektif pengguna jasa GPK dalam hal ini adalah Kepala Sekolah dan Guru, serta Orang Tua ABK. Kompetensi GPK merupakan faktor penting dalam upaya mensukseskan pendidikan inklusif, sehingga adanya data tentang kompetensi GPK dari *Resource Center* akan sangat membantu upaya memaksimalkan peran dan fungsi *Resource Center* dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif.

B. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) sangat membutuhkan suatu sistem dukungan bagi kelancaran prosesnya. Salah satu sistem dukungan tersebut adalah *Resource Center* yang

harus dipersiapkan dengan matang agar mampu memberikan kontribusi maksimal dalam membantu SPPI memberikan layanan pendidikan bagi siswa-siswanya terutama ABK. Untuk itu penulis/peneliti memandang perlu untuk lebih mengangkat permasalahan intern *Resource Center*, khususnya dalam segi kompetensi GPK yang ada di *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menetapkan fokus penelitian ini diarahkan untuk mengetahui *kompetensi GPK pada Resource Center pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di SPPI.*

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : *Bagaimanakah kompetensi GPK pada Resource Center pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di SPPI?*

Sebagai panduan bagi peneliti untuk meneliti obyek penelitian adalah rumusan pertanyaan penelitian yang spesifik untuk memperoleh gambaran tentang:

1. Bagaimanakah kompetensi *Task Achievement* GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di SPPI?

2. Bagaimanakah kompetensi *Relationship* GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di SPPI?
3. Bagaimanakah kompetensi *Personal Attribut* GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di SPPI?
4. Bagaimanakah kompetensi *Managerial* GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di SPPI?
5. Bagaimanakah kompetensi *Leadership* GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di SPPI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang *kompetensi Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada Resource Center pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di*

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) . Secara spesifik adalah untuk mengetahui gambaran tentang:

1. Kompetensi *Task Achievement* GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di SPPI
2. Kompetensi *Relationship* GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di SPPI
3. Kompetensi *Personal Attribut* GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di SPPI
4. Kompetensi *Managerial* GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di SPPI
5. Kompetensi *Leadership* GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai GPK menurut perspektif kepala sekolah, guru, dan orang tua ABK di SPPI.

D. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat praktis dan teoritis.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

a. Pusat Sumber (*Resource Center*):

Diperolehnya informasi tentang kompetensi GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat akan membuat *Resource Center* pendukung pendidikan inklusif dapat mempersiapkan GPK yang kompeten dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI):

Diperolehnya gambaran tentang kompetensi GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat maka akan memudahkan SPPI membuat program layanan bagi ABK serta memudahkan mengatur penugasan personil di SPPI yang menangani ABK

c. Guru Pembimbing Khusus (GPK):

Diperolehnya gambaran tentang kompetensi GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat maka akan memacu GPK untuk lebih meningkatkan keahliannya dalam membantu SPPI terutama keahlian menangani ABK dan keahlian lainnya

d. Dinas Pendidikan:

Terungkapnya gambaran tentang kompetensi GPK pada *Resource Center* pendidikan inklusif di Kota Bandung provinsi Jawa Barat dapat digunakan sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam membuat suatu kebijakan khususnya dalam merancang program-

program pengembangan sebuah Resource Center khususnya pengembangan sumber daya manusia.

c. Peneliti selanjutnya:

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi data dan fakta yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk mengetahui kompetensi GPK pada Resource Center pendidikan inklusif dari sudut pandang yang lain.

2. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis memiliki manfaat untuk:

- a. Menjadi bahan kajian bagi pengembangan sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan pengembangan pendidikan inklusif
- b. Menjadi bahan kajian tentang konsep Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berkualitas dalam upaya pengembangan *Resource Center* sebagai sistem dukungan pendidikan inklusif.
- c. Sebagai bahan evaluasi keterlaksanaan layanan pendidikan inklusif di SPPI.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi eksploratori, sedangkan model penelitian yang dipilih adalah fenomenologi (*phenomenology*). Fenomena yang diteliti adalah kompetensi guru pembimbing khusus (GPK) pada *Resource Center* yang bertugas di sekolah penyelenggara

pendidikan inklusif (SPPI). Subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan orang tua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sebuah SPPI. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Pengolahan data dilakukan sepanjang penelitian, menggunakan kombinasi analisis pernyataan, analisis arti, dan deskripsi umum. Keabsahan data diperoleh dengan cara melakukan pengecekan terhadap data secara teliti dan melakukan kros cek kepada sumber data.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian terhadap fenomena kompetensi Guru Pembimbing Khusus (GPK) ini dilakukan pada semester II tahun pelajaran 2010/2011. Fenomena yang diteliti adalah kompetensi GPK "X", berasal dari *Resource Center* "X" Kota Bandung yang bertugas sebagai GPK salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu SMP Negeri "Y" Kota Bandung. Alasan memilih kompetensi GPK "X" sebagai fenomena yang akan diteliti adalah karena GPK tersebut ditugaskan secara resmi dari *Resource Center* "X" dan masih aktif menjalankan tugasnya hingga saat peneliti melakukan penelitian ini. Sedangkan alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu di SMPN "Y" didasari oleh adanya fenomena dimaksud yang terlihat/terjadi di sekolah tersebut, disamping hal-hal berikut ini:

1. SMPN "Y" adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif meskipun secara formal kedinasan tidak ditunjuk langsung sebagai sekolah inklusif. SMPN "Y" termasuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

ditandai dengan adanya anak berkebutuhan khusus (ABK) yang beragam di sekolah tersebut, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, autis serta ABK lainnya yang belum teridentifikasi dengan jelas

2. SMPN “Y” telah berusaha melayani kebutuhan ABK meskipun belum secara maksimal. SPPI ini dalam praktek melayani kebutuhan ABK mendapat bantuan *Resource Center* “X” dalam bentuk pengiriman guru pembimbing khusus (GPK)
3. SMPN “Y” memiliki personil yang bersikap terbuka terhadap penelitian pendidikan inklusif sehingga bersedia memberikan keterangan/informasi yang diperlukan peneliti.